

## PSBB DKI JAKARTA JILID II DAN TANTANGAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

19

Masyithah Aulia Adhiem

### Abstrak

*DKI Jakarta masih merupakan penyumbang terbesar kasus positif Covid-19 di Indonesia, yaitu mencapai 24% dari total kasus keseluruhan. Pertambahan ini mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan PSBB Jilid II selama 14 hari ke depan terhitung sejak 14 September 2020. Risikonya adalah banyak sektor industri saat ini berada dalam tahap pemulihan akan kembali berhenti. Program pemulihan ekonomi nasional juga menghadapi tantangan akibat pemberlakuan PSBB Jilid II. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari PSBB Jilid II DKI terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional yang sedang berjalan. Disimpulkan bahwa jika PSBB Jilid II DKI diterapkan cukup lama, maka akan mengganggu pemulihan ekonomi DKI dan nasional karena DKI juga penyumbang terhadap perekonomian nasional. Pusat perlu mengawasi pelaksanaan PSBB Jilid II DKI agar berjalan efektif dan segera kembali pada kenormalan baru.*

### Pendahuluan

Gubernur DKI Jakarta mengumumkan pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang resmi berlaku selama 14 hari ke depan sejak 14 September 2020. Kebijakan ini diambil sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19,

khususnya di DKI Jakarta, yang semakin tinggi beberapa minggu terakhir.

Pemberlakuan PSBB DKI Jakarta menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemulihan ekonomi DKI dan nasional akibat pandemi Covid-19. Industri dan sektor usaha lain yang sebelumnya tengah berbenah harus kembali menyesuaikan agar tetap bisa bertahan. Guna mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan penyesuaian dengan menetapkan beberapa poin penting dalam pelaksanaan PSBB Jilid II kali ini, salah satunya adalah



relaksasi pembatasan untuk 11 sektor, baik esensial maupun non-esensial, dari yang semula hanya terbatas pada sektor-sektor esensial saja. Meskipun demikian, perlu ada upaya lebih berupa koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Tulisan ini mengkaji kebijakan PSBB Jilid II dan tantangan yang dihadapi dalam memulihkan perekonomian regional DKI maupun nasional.

### PSBB DKI Jakarta Jilid II

Wabah Covid-19 masih terus menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Pada 14 September 2020 tercatat sebanyak 54.277 penambahan kasus positif dengan total kasus mencapai lebih dari 225.000 secara nasional dan DKI termasuk penyumbang terbesar. Oleh karena itu, Pemerintah DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk memberlakukan kembali PSBB selama 14 hari ke depan (Kompas, 14 September 2020).

Selama pelaksanaan PSBB Jilid I dan PSBB transisi di DKI terjadi penurunan daya beli konsumen yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan penurunan permintaan mencapai 88,14% dari pelaku usaha di Jakarta terutama dari sektor akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya (BPS, 2020:11). Dampak secara luas tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat mencapai titik terendah sepanjang 10 tahun terakhir, yaitu mencapai minus 8,22% (*y-on-y*) (BPS Prov. DKI Jakarta, 5 Agustus 2020). DKI Jakarta menyumbang 17,17% dari total PDB nasional sehingga ketika terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi di Jakarta turut berdampak terhadap

pertumbuhan ekonomi Indonesia di kurun waktu yang sama, BPS menyebutkan bahwa PDB Nasional mengalami kontraksi sebesar -5,32% (*y-on-y*) (BPS, 5 Agustus 2020).

Pemberlakuan kembali PSBB Jilid II Jakarta dipastikan akan kembali memberi tekanan di tengah keputusan pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 akan tetap terkoreksi di angka minus 2,1%. Relaksasi terhadap 11 sektor menjadi salah satu alasan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak turun lebih rendah dari minus 2%. (Kompas.com, 15 September 2020).

### Tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional

PSBB mengakibatkan beberapa sektor usaha yang semula berupaya bangkit akan sulit untuk mengambil langkah penyelamatan usahanya ketika pembatasan diberlakukan kembali, salah satunya adalah sektor penerbangan yang telah mengalami penurunan hingga 65% sejak terjadinya pandemi di Indonesia. Kontribusi sektor penerbangan yang semula mencapai 5,17% di tahun 2018 mengalami penurunan hingga minus 5,2% pada tahun 2020. (Media Indonesia, 15 September 2020).

Industri manufaktur juga dipastikan akan terkena imbas pembatasan sosial ini. Industri manufaktur keramik misalnya yang pada kurun waktu PSBB Jakarta Jilid I mengalami penurunan utilitas produksi dari 65% hingga 30% dan bahkan ditambah dengan merumahkan karyawan hingga 15.000 orang. Hal tersebut dikarenakan sekitar 20%

konsumen ritel berada di provinsi DKI Jakarta. Pemberlakuan PSBB Jilid II menjadi suatu tantangan tersendiri bagi industri ini yang baru akan memasuki tahap pemulihan. Industri manufaktur lainnya yang juga terdampak adalah manufaktur otomotif. Pembatasan jumlah karyawan mengakibatkan penurunan produksi sehingga beberapa perusahaan kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar ekspor (Kontan.co.id, 13 September 2020). Perusahaan-perusahaan rintisan juga ikut terdampak karena banyak dari perusahaan tersebut bergantung pada aktivitas masyarakat dan daya beli masyarakat, yang saat ini semakin berkurang (Bisnis Indonesia, 14 September 2020).

Keputusan penerapan PSBB Jilid II juga diambil bersamaan dengan momentum perbaikan di berbagai indikator ekonomi seiring dengan berjalannya penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh karena itu kebijakan PSBB Jilid II DKI tersebut memberikan tantangan bagi keberhasilan program PEN, termasuk DKI. Perekonomian, baik regional maupun nasional, juga tetap bergantung pada bagaimana realisasi kebijakan PEN sebagai upaya mengembalikan daya beli masyarakat dan konsumsi dalam negeri.

Rencana penerapan PSBB Jilid II yang diumumkan secara mendadak mengakibatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun. Namun kemudian setelah

adanya pernyataan ulang dan terperinci oleh Gubernur DKI Jakarta serta pernyataan Presiden RI terkait pembatasan sosial di daerah, pasar saham memberikan sentimen positif, ditunjukkan dengan kembali menguatnya sebesar 145,12 poin atau 2,89% dan rupiah menguat 10 poin atau 0,07% (Media Indonesia, 15 September 2020).

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika Pemerintah Pusat mendukung apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, seperti DKI akan memberikan jaminan tersendiri bagi pasar. Hal yang tidak kalah penting adalah menentukan target yang jelas dari pelaksanaan PSBB Jakarta Jilid II ini. Menurut Peneliti *The Indonesian Institute*, M. Rifki Fadilah, pemerintah perlu menetapkan target penurunan kasus Covid-19 untuk memudahkan pengukuran keberhasilan PSBB Jilid II, misalnya memastikan penurunan angka aktif hingga 20%-30% (Media Indonesia, 14 September 2020). Adanya indikator tersebut memberikan kemudahan bagi pemerintah maupun dunia industri untuk menentukan langkah kebijakan selanjutnya.

Pelaksanaan PSBB Jilid II kali ini lebih menekankan pada pencegahan penyebaran Covid-19 di klaster perkantoran sehingga perlu pengurangan jumlah maksimal karyawan di lingkungan kantor, baik pemerintah maupun swasta. Di samping itu juga pelarangan kerumunan di masyarakat. Beberapa sektor usaha justru mendapatkan kelonggaran dibandingkan dengan pelaksanaan PSBB Jilid 1. Ada 11 sektor usaha yang masih diperbolehkan beroperasi yaitu: (a) sektor kesehatan, (b) bahan

pangan/makanan/minuman, (c) energi, (d) komunikasi dan teknologi informasi, (e) keuangan, (f) logistik, (g) perhotelan, (h) konstruksi, (i) industri strategis, (j) pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau (k) kebutuhan sehari-hari (Pergub DKI No. 88 Tahun 2020). Relaksasi tersebut diharapkan memberikan dukungan pada usaha pemulihan dunia usaha serta perekonomian, baik nasional maupun regional.

Seperti yang diketahui bahwa sektor perdagangan dan industri merupakan sektor yang terdampak cukup berat akibat pandemi dan penerapan PSBB selama ini. PSBB Jilid II diharapkan memberikan kesempatan bagi industri dan perdagangan, khususnya ritel, untuk bangkit dan pulih kembali. (Kompas, 12 September 2020). Relaksasi yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta juga memberikan kesempatan bagi beberapa industri untuk tetap bertahan. Salah satunya adalah angkutan daring. Pembatasan sosial sebelumnya telah mengakibatkan turunnya pendapatan para pengemudi ojek daring hingga 70-80%. Dengan tetap diperbolehkannya layanan angkutan daring memberikan kesempatan untuk tetap memiliki pendapatan meskipun belum bisa kembali ke kondisi sebelum pandemi (Kompas, 12 September 2020).

Strategi lain yang bisa dilakukan adalah mendorong digitalisasi layanan dari berbagai sektor usaha, termasuk UKM. Sektor perbankan misalnya perlu mempercepat penetrasi digitalisasi kepada masyarakat guna

memudahkan transaksi perbankan di antaranya adalah pembelian instrumen obligasi pemerintah dan reksadana secara daring. Integrasi data secara digital juga dapat mendorong penyaluran kredit, salah satu contoh adalah integrasi data Bank BTN dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Kompas, 14 September 2020). Di samping itu, kebijakan relaksasi yang diterapkan pada sektor perhotelan juga memberikan peluang untuk bertahan selama pandemi bagi industri tersebut untuk menghindari *cashflow* negatif yang akan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Kontan.co.id, 15 September 2020).

Percepatan realisasi penyerapan anggaran PEN oleh pemerintah pusat dan daerah juga menjadi dorongan bagi pemulihan ekonomi di tengah pemberlakuan kembali PSBB Jilid II. Bantuan subsidi upah misalnya yang telah mencapai 95,4% dan diharapkan mampu dimanfaatkan oleh para pekerja sehingga menjadi faktor *multiplier effect* (Media Indonesia, 14 September 2020). Para pengusaha juga berharap anggaran PEN bagi pelaku usaha ditambahkan secara proporsional untuk membantu para pengusaha bertahan selama dua pekan kedepan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani (Bisnis Indonesia, 14 September 2020).

PSBB Jilid II DKI hendaknya tidak mengganggu upaya pusat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang positif pada triwulan III/2020 (Juli-September). Untuk itu diperlukan sinergitas antar seluruh pemangku kepentingan agar

kebijakan-kebijakan yang telah dan akan diambil memberikan ekosistem yang mendukung pemulihan ekonomi namun juga mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

### Penutup

Pemberlakuan kembali PSBB DKI Jakarta Jilid II menghadirkan tantangan bagi upaya pemulihan ekonomi nasional, termasuk DKI. Berbagai penyesuaian dan relaksasi kebijakan PSBB Jilid II ini diharapkan mampu menjaga agar pertumbuhan ekonomi, baik regional maupun nasional, tidak terkoreksi cukup jauh tetapi diharapkan tumbuh positif pada triwulan III/2020.

Tantangan tersebut perlu disikapi dengan cermat sehingga dapat memberikan hasil yang sejalan dengan upaya-upaya pemulihan ekonomi nasional yang sedang berjalan saat ini melalui program PEN. Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting agar kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan seluruh masyarakat terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

DPR RI, melalui Komisi VI, dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu memberi perhatian khusus tentang bagaimana pelaksanaan PSBB Jilid II DKI tidak semakin memperburuk kondisi perekonomian saat ini yang sudah mulai membaik. Selain itu juga perlu dilakukan diskusi dengan mitra kerja terkait untuk memastikan sinergitas kebijakan yang mendukung pemulihan dunia industri tanpa mengesampingkan keselamatan semua pihak. Fungsi anggaran DPR RI melalui Komisi XI juga diperlukan

untuk memastikan percepatan realisasi anggaran PEN tahun 2020 agar ekonomi nasional dapat segera pulih dan terus bertahan di tengah pandemi yang terjadi.

### Referensi

- “Anggaran PEN Diharapkan Ditambah”, *Bisnis Indonesia*, 14 September 2020, hal. 6.
- Badan Pusat Statistik Prov. DKI Jakarta. 2020. *Berita Resmi Statistik: Perekonomian Jakarta Terhempas ke Titik Terendah*, No. 34/08/31/Th. XXII, 5 Agustus 2020, hal. 1
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020*, No. 64/08/Th. XXIII, 5 Agustus 2020, hal. 1-6
- “Bantuan Subsidi Upah Capai 95,4%”, *Media Indonesia*, 14 September 2020, hal 11.
- “Ekonomi Sangsikan Keberhasilan PSBB Jilid II”, *Media Indonesia*, 14 September 2020, hal. 11
- “Operator Hotel Sambut Baik Rencana Penggunaan Hotel untuk Isolasi Pasien Covid 19”, *Kontan.co.id*, 22 September 2020, <https://industri.kontan.co.id/news/operator-hotel-sambut-baik-rencana-penggunaan-hotel-untuk-isolasi-pasien-covid-19>, diakses 15 September 2020.
- “Pandemi, Bank Percepat Proses Digitalisasi”, *Kompas*, 14 September 2020, hal. 9.
- “Pemulihan Ekonomi Sudah On Track”, *Media Indonesia*, 15 September 2020, hal. 10.
- “Penerapan PSBB di DKI Jakarta Bakal Berdampak bagi Industri Manufaktur”, *Kontan.co.id*, 13 September 2020, <https://industri.kontan.co.id/news/>

penerapan-psbb-di-dki-jakarta-bakal-berdampak-bagi-industri-manufaktur, diakses 15 September 2020.

“Penerbangan Tergelincir Hingga 65%”, *Media Indonesia*, 15 September 2020, hal. 10.

“Perusahaan Rintisan Makin Resah”, *Bisnis Indonesia*, 14 September 2020, hal. 5.

“Peta Sebaran Kasus per Provinsi”, [Covid19.go.id](https://covid19.go.id), 15 September 2020, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses 15 September 2020.

“Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III di Bawah -2,1 Persen Akibat PSBB DKI”, *Kompas.com*, 15 September 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/09/15/181800826/sri-mulyani-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-iii-di-bawah-2-1-persen-akibat-psbb> diakses 15 September 2020.

“Ujian Kedua bagi Pengusaha”, *Kompas*, 12 September 2020, hal. 9.



Masyithah Aulia Adhiem  
[masyithah.adhiem@dpr.go.id](mailto:masyithah.adhiem@dpr.go.id).

Masyithah Aulia Adhiem S.Si., M.E. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Biologi Fakultas MIPA Universitas Indonesia tahun 2006 dan S2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2009. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan antara lain “Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa untuk Pengentasan Kemiskinan” dan “Kebijakan Impor Gula: Potensi Dampak dan Upaya Pengamanan Stok Nasional”.

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.